

ISU Sepekan

BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

Minggu ke 2 Bulan Juni 2021 (tanggal 4 s.d 10 Juni)

POLEMIK TES TWK PEGAWAI KPK

Anin Dhita Kiky Amrynudin
Peneliti Pertama/Politik Dalam Negeri
anin.amrynudin@dpr.go.id



**Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI**

ISU ATAU PERMASALAHAN

Adanya Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebabkan 51 pegawai diberhentikan dan 24 pegawai dilakukan pembinaan, menuai kontroversi berbagai pihak. Palsunya, soal didalam tes TWK tersebut dianggap tidak ada kaitannya dengan pemberantasan korupsi. Sampai saat ini, persoalan terus bergulir hingga para pegawai yang dinonaktifkan membuat pengaduan ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menurut Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia yaitu Usman Hamid termasuk kedalam 'pelanggaran hak asasi manusia yang berat' sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 94 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah memberikan tanggapan terkait persoalan ini, yaitu meminta agar TWK tidak dijadikan sebagai dasar pemberhentian para pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Begitupun dengan Anggota DPR RI Komisi II Guspari Gaus yang mengatakan bahwa alih status pegawai KPK menjadi ASN semestinya tidak merugikan pegawai KPK. Namun demikian Pimpinan KPK tetap menolak mencabut SK Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan yang disebut menjadi dasar penonaktifan 75 pegawai yang tidak lolos TWK, dengan alasan bahwa Kebijakan Pimpinan KPK dilatarbelakangi mitigasi risiko/permasalahan yang mungkin timbul dengan adanya 75 pegawai KPK yang tidak memenuhi persyaratan.

SUMBER

kompas.com, 8 dan 17 Mei 2021; BBCNews Indonesia, 8 Juni 2021; dpr.go.id, 18 Mei 2021; detik.com, 2 Juni 2021.